

Arah Strategi Baru Komunikasi Internasional Diplomasi Pemerintah Baru Indonesia 2024

Kamaruddin Hasan¹, Zulfadli², Asrianda³, Asmaul Husna⁴

^{1,4} Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh

² Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh

³ Teknik Informatika, Universitas Malikussaleh

e-mail: kamaruddin@unimal.ac.id¹, zulfadli@unimal.ac.id², asrianda@unimal.ac.id³

Abstrak

Transformasi digital mengubah paradigma hubungan internasional, mempengaruhi diplomasi, dan membuka peluang baru bagi diplomasi ekonomi. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadapi tantangan besar. Dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara diplomasi ekonomi dan diplomasi digital dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menggali bagaimana diplomasi digital. Dapat memperkuat kerja sama ekonomi internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, memperluas akses pasar global melalui teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi digital memainkan peran krusial dalam meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Untuk mencapainya, pemerintah harus memperkuat infrastruktur digital. Meningkatkan keamanan siber, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan kebijakan diplomasi ekonomi berbasis digital guna menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Digital, Ekonomi Global, Kebijakan Luar Negeri, Transformasi Digital*

Abstract

Digital transformation is reshaping the paradigm of international relations, influencing diplomacy, and opening new opportunities for economic diplomacy. The Indonesian government, under the leadership of President Prabowo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming, faces significant challenges in leveraging technological advancements to strengthen Indonesia's position in the global market. This study aims to analyze the relationship between economic diplomacy and digital diplomacy in the context of Indonesia's foreign policy. Using a qualitative approach and descriptive analysis, this research explores how digital diplomacy can enhance international economic cooperation, stimulate domestic economic growth, and expand access to global markets through digital technology. The findings indicate that digital diplomacy plays a crucial role in enhancing Indonesia's competitiveness in the international arena. To achieve this, the government must strengthen digital infrastructure, improve cybersecurity, and develop policies that support technological innovation. This study provides recommendations for the Indonesian government to optimize digital-based economic diplomacy policies in order to create sustainable new economic opportunities.

Keywords *Economic Diplomacy, Digital Diplomacy, Global Economy, Foreign Policy, Digital Transformation.*

PENDAHULUAN

Diplomasi dan komunikasi internasional telah mengalami transformasi signifikan dengan adanya digitalisasi. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, pendekatan tradisional dalam diplomasi tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika global. Di bawah kepemimpinan

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Indonesia diharapkan memperkenalkan strategi baru yang adaptif terhadap perubahan ini, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memperkuat posisi dan pengaruh Indonesia di kancah internasional (Filsafat & Aquinas, 2024).

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan internasional yang menjadi cerminan posisi suatu negara di kancah global. Dalam konteks ini, komunikasi internasional memegang peran strategis dalam membangun persepsi positif, menjalin kerjasama, dan menyelesaikan konflik antarnegara (Samiaji et al., 2022). Di tengah perubahan cepat akibat globalisasi, pendekatan tradisional dalam diplomasi sering kali tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas tantangan internasional. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, dituntut untuk mengadopsi strategi baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diharapkan membawa angin segar dalam diplomasi Indonesia. Dinamika global yang terus berubah, tantangan dalam menentukan posisi strategis di antara kekuatan besar dunia. Seperti Amerika Serikat dan China, menjadi salah satu isu utama. Pendekatan tradisional sebelumnya mengandalkan "politik optik" dan popularitas di media sosial perlu beralih ke strategi yang lebih substansial dan berbasis teknologi (Nulty et al., 2016).

Digitalisasi telah mengubah lanskap komunikasi internasional secara fundamental. Media sosial, big data, dan platform digital lainnya tidak hanya menjadi alat komunikasi, Menjadi medan baru untuk memengaruhi opini global, menciptakan aliansi strategis, dan memperkuat citra internasional (Mangold & Faulds, 2009). Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi digital dalam diplomasi. Tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal kapabilitas teknis, keamanan data, dan pengelolaan informasi (Subbian et al., 2021).

Pendekatan diplomasi tradisional yang berfokus pada pertemuan fisik dan negosiasi langsung kini berhadapan dengan pendekatan digital yang lebih cepat dan efisien (Alayida et al., 2023). Negara-negara maju telah memanfaatkan teknologi ini untuk memperkuat posisi geopolitik mereka. Indonesia masih berada dalam tahap awal pemanfaatan diplomasi digital. Kepemimpinan baru diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi ini untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global.

Politik luar negeri Indonesia yang tetap mengedepankan prinsip bebas aktif menghadirkan tantangan tersendiri di tengah dinamika geopolitik dunia (Wijayanti, 2022). Rivalitas antara Amerika Serikat dan China tidak hanya melibatkan aspek ekonomi dan militer, tetapi juga perang informasi dan diplomasi digital (Koessetianto et al., 2024). Indonesia perlu menemukan jalan tengah yang tidak hanya mendukung kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat posisinya di mata dunia. Diplomasi digital membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perannya di forum multilateral, seperti ASEAN dan PBB. Penggunaan teknologi informasi, Indonesia dapat meningkatkan partisipasi aktifnya dalam diskusi global terkait isu-isu strategis. Seperti perubahan iklim, keamanan regional, dan stabilitas ekonomi. Pendekatan yang tepat, diplomasi digital dapat menjadi alat untuk memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan Asia-Pasifik dan dunia.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah memahami bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran. Dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mereformasi pendekatan diplomasi tradisional menjadi lebih proaktif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global. Mengeksplorasi peluang dan tantangan di era digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang strategi komunikasi internasional Indonesia di masa depan. Penelitian bertujuan untuk memahami transformasi diplomasi Indonesia di era digital, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Penelitian menganalisis strategi komunikasi baru, mengidentifikasi bagaimana digitalisasi memengaruhi hubungan bilateral dan multilateral. Mengevaluasi peran teknologi digital dalam membentuk citra Indonesia di dunia internasional. Penelitian akan menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat diplomasi digital Indonesia.

Konteks diplomasi Indonesia selama sembilan tahun terakhir menunjukkan pendekatan yang cenderung statis (Paramasatya & Poespojoedho, 2019). Banyak fokus pada politik transaksional dan popularitas di media sosial. Menghadirkan tantangan bagi kepemimpinan baru untuk membawa perubahan nyata yang berbasis pada diplomasi preventif. Penyelesaian konflik melalui dialog, penguatan citra positif Indonesia, dalam era digitalisasi. Muncul peluang baru untuk memperkuat diplomasi melalui media digital, yang belum dieksplorasi secara menyeluruh.

Studi tentang diplomasi Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada pendekatan tradisional dan belum sepenuhnya mengkaji pengaruh era digital. Minimnya penelitian menghubungkan diplomasi digital dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Terutama di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, menjadi celah yang perlu diisi. Literatur yang ada belum membahas secara mendalam bagaimana teknologi digital dapat memengaruhi citra internasional Indonesia di tengah rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China.

Diplomasi ekonomi menjadi salah satu elemen penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terutama di era globalisasi yang semakin terintegrasi. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kapabilitasnya untuk mencapai tujuan diplomasi ekonomi yang lebih efektif sekaligus memperkuat strategi dan arah diplomasi ekonomi Indonesia (Sabaruddin, 2017). Diplomasi ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas hubungan dagang dan investasi, tetapi juga sebagai upaya untuk memajukan kepentingan nasional di ranah internasional.

Secara konseptual, diplomasi sering kali dianggap sebagai istilah payung yang mencakup berbagai pendekatan, termasuk diplomasi perdagangan dan diplomasi komersial (Lee & Hocking, 2018). Diplomasi ekonomi lebih spesifik bertindak sebagai mekanisme untuk mengelola hubungan internasional di bidang perdagangan, investasi, dan ekonomi. Melibatkan agen-agen perwakilan negara yang berinteraksi dengan aktor ekonomi global untuk menciptakan peluang strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus menjaga stabilitas politik internasional (Pigman, 2005).

Diplomasi ekonomi menjadi parameter utama dalam mengukur efektivitas hubungan ekonomi antarnegara (Killian, 2022). Melibatkan pertukaran informasi, negosiasi, dan implementasi kebijakan yang bertujuan memperkuat perdagangan serta investasi. Keberhasilan diplomasi ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan strategi yang adaptif dan proaktif terhadap dinamika ekonomi global (Killian, 2022).

Untuk Indonesia, diplomasi ekonomi tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat posisi strategisnya di kancah internasional. Dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki, seperti sumber daya alam, pasar domestik yang luas, dan posisi geografis yang strategis (Sholikin, 2018), Indonesia memiliki peluang besar untuk memaksimalkan manfaat dari hubungan ekonomi internasional. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengintegrasikan diplomasi ekonomi ke dalam kebijakan luar negeri secara menyeluruh.

Salah satu prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia adalah penguatan diplomasi ekonomi, yang menjadi bagian dari strategi *Prioritas* (Pambudi, 2021). Langkah ini memberikan arah baru yang signifikan bagi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam merespons dinamika global. Penguatan diplomasi ekonomi mencakup upaya meningkatkan dan memperkuat kerja sama di berbagai tingkatan, baik bilateral, regional, multilateral, maupun plurilateral (Nabilla, 2021). Pemerintah Indonesia berfokus pada strategi yang saling menguntungkan, dengan penetrasi ke pasar yang dinilai potensial dan pengembangan sektor-sektor yang lebih luas, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Persatuan Emirat Arab (PEA) atau United Arab Emirates (UAE) menjadi salah satu mitra strategis yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo UAE dipandang sebagai pasar yang sangat potensial untuk ekspansi, terutama karena posisinya yang strategis sebagai pusat perdagangan dan investasi di Timur Tengah (W. R. D. Astuti & Fathun, 2020). Melalui kerja sama ekonomi dengan UAE, Indonesia tidak hanya membawa kepentingan nasional di bidang ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan politik yang mendukung stabilitas dan pengaruh internasional.

Strategi diplomasi ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pasar domestik Indonesia, yang diintegrasikan dengan peluang pasar global (Delanova, 2016). Pemerintah terus mendorong sinergi antara pelaku ekonomi nasional dengan mitra asing, sehingga hubungan yang terjalin mampu memberikan keuntungan jangka panjang bagi kedua belah pihak (Susanto, 2024). Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi pemain aktif dalam percaturan ekonomi global, dengan tetap mempertahankan prinsip bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri negara.

Diplomasi digital memainkan peran penting dalam mendukung strategi ekonomi, terutama dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi. Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, diplomasi digital memungkinkan pemerintah untuk memperluas pengaruhnya di pasar internasional melalui platform digital yang efisien (Bjola & Holmes, 2019). Teknologi digital memberikan akses lebih luas dan cepat untuk mempromosikan perdagangan. Menarik investasi, serta memperkuat posisi ekonomi suatu negara di dunia global. Menggunakan saluran digital, negara dapat menyampaikan informasi strategis tentang peluang ekonomi. Kebijakan investasi, dan keunggulan pasar mereka kepada audiens internasional secara real-time (Rashica, 2018).

Dalam praktiknya, diplomasi digital mendukung strategi ekonomi melalui peningkatan komunikasi yang lebih terfokus dan adaptif terhadap kebutuhan pasar global (Adesina, 2017). Media sosial, situs web resmi, dan platform digital lainnya, pemerintah dapat mempromosikan produk unggulan. Membangun merek nasional, serta menarik perhatian investor asing, diplomasi digital juga memfasilitasi partisipasi dalam forum ekonomi internasional secara virtual (I. Y. Astuti et al., 2019). Tidak hanya menghemat biaya tetapi juga memperluas jangkauan keterlibatan diplomatik (Abdillah, 2024). Relevan bagi negara-negara berkembang yang ingin meningkatkan daya saing mereka di pasar global tanpa terbatas pada kendala geografis atau biaya logistik (Olson et al., 2021).

Diplomasi digital berfungsi sebagai alat untuk memitigasi risiko dan meningkatkan transparansi dalam hubungan ekonomi internasional. Melalui pengumpulan data dan analisis intelijen digital, pemerintah dapat mengidentifikasi peluang pasar baru (Hamonangan & Assegaff, 2020). Memprediksi tren ekonomi global, dan merespons tantangan seperti proteksionisme atau krisis ekonomi dengan lebih efektif. Sebagai contoh, data besar (big data) yang dihasilkan dari diplomasi digital dapat digunakan untuk menganalisis preferensi konsumen internasional (Sahputra & Nendi, 2024). Pola perdagangan, dan potensi kerja sama ekonomi yang lebih menguntungkan.

Di sisi lain, strategi ekonomi yang didukung oleh diplomasi digital juga mendorong inovasi dalam hubungan bilateral atau multilateral (Wigell, 2016). Kerja sama ekonomi yang berbasis digital, seperti e-commerce lintas negara dan penggunaan teknologi blockchain dalam perdagangan internasional. Menunjukkan bagaimana diplomasi digital dapat menciptakan peluang ekonomi baru (Olsen, 2023). Diplomasi digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga platform kolaborasi untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi antar negara (Gautam, 2013).

Menggabungkan diplomasi digital dan strategi ekonomi, negara dapat mengoptimalkan posisi mereka di pasar global (Ghina Fitri Ariesta Susilo & Rani, 2020). Memperkuat hubungan internasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya sekadar alat politik (Gilboa, 2008). Instrumen strategis dalam membangun ekonomi yang berdaya saing tinggi di era digital.

Diplomasi digital memungkinkan negara-negara untuk mengakses data dan informasi strategis dalam waktu nyata, yang menjadi aset penting dalam perumusan kebijakan ekonomi (Parayil, 2005). Dengan memanfaatkan big data dan analitik digital, pemerintah dapat memahami tren pasar global (Handaningtias et al., 2022). Kebutuhan konsumen internasional, serta pola perdagangan yang relevan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru. Mengarahkan investasi ke sektor yang potensial, serta mengantisipasi tantangan ekonomi di masa depan (Yuniarti Utami et al., 2023). Menjadikan diplomasi digital sebagai katalis dalam mempercepat proses pengambilan keputusan strategis di bidang ekonomi.

Diplomasi digital membuka peluang untuk meningkatkan keterlibatan aktor non-negara, seperti perusahaan teknologi, startup, dan komunitas bisnis global (Dharossa & Rezasyah, 2020). Peran aktor non-negara dalam ekosistem diplomasi digital menciptakan sinergi antara sektor publik dan swasta, yang pada akhirnya dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Fayard et al., 2012). Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan teknologi dapat menghasilkan solusi digital yang mendukung kelancaran perdagangan internasional (Trade & Rights, 2006). Pengembangan platform pembayaran lintas batas atau sistem logistik yang efisien. Diplomasi digital menjadi landasan untuk membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Diplomasi digital memungkinkan penguatan branding dan reputasi ekonomi suatu negara di panggung internasional (Halim et al., 2023). Melalui penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, negara dapat mempromosikan produk unggulan, budaya, serta peluang investasi yang dimilikinya kepada audiens global (Ulfa et al., 2023). Tidak hanya meningkatkan daya tarik ekonomi suatu negara, tetapi juga memperkuat posisinya dalam jaringan ekonomi global. Dengan kombinasi antara diplomasi digital dan strategi ekonomi yang matang. Negara memiliki peluang besar untuk mencapai kestabilan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperluas pengaruhnya di dunia internasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian mengkaji literatur relevan tentang diplomasi ekonomi dan diplomasi digital. Menganalisis kebijakan diambil oleh pemerintah Indonesia dalam merespons perkembangan ekonomi digital. Data digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Dokumen kebijakan pemerintah, laporan internasional, dan artikel-artikel terkait. Wawancara dengan para ahli dalam bidang diplomasi ekonomi dan teknologi digital dapat dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan di lapangan.

Dalam analisisnya, penelitian menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan diplomasi digital dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Penelitian bertujuan mengungkap tantangan, peluang, dan kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam menghadapi ekonomi digital global. Diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dalam mengoptimalkan peran diplomasi ekonomi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kapabilitasnya dalam mencapai tujuan diplomasi ekonomi. Terutama dalam memperkuat strategi dan arah kebijakan di bidang diplomasi digital. Diplomasi sering kali dipandang sebagai istilah umum yang mencakup berbagai konsep, termasuk diplomasi perdagangan dan diplomasi komersial. Diplomasi ekonomi menjadi parameter penting, aktivitas perdagangan, investasi, dan hubungan ekonomi internasional. Dilakukan oleh perwakilan resmi dari berbagai negara dengan kebijakan ekonomi luar negeri yang berbeda. Pendekatan tidak hanya melibatkan upaya untuk memperluas pangsa pasar dan menarik investasi asing. Bertujuan untuk membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, diplomasi ekonomi Indonesia harus mampu menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang di pasar internasional untuk memperkuat posisi ekonomi negara (Haryono, 2018).

Diplomasi ekonomi memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan erat antara kepentingan nasional dan dinamika pasar global. Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia tidak hanya memfokuskan upayanya pada peningkatan volume perdagangan dan investasi asing. Memperkuat daya saing produk lokal di pasar internasional, sejalan dengan kebutuhan untuk memperluas diversifikasi ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, dan membuka peluang baru bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional. Strategi ini harus diiringi dengan penguatan kapabilitas negosiasi dan diplomasi yang berorientasi pada hasil. Terutama dalam menghadapi negara-negara dengan kepentingan ekonomi yang berbeda.

Integrasi diplomasi ekonomi dengan teknologi digital menjadi hal yang krusial di era digitalisasi. Kehadiran teknologi dapat memberikan efisiensi dalam berbagai proses, seperti negosiasi perdagangan, analisis data pasar. Hingga penguatan kampanye promosi produk unggulan Indonesia. Digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk menjangkau mitra internasional dengan cara yang lebih cepat dan efektif. Memanfaatkan big data untuk menyusun kebijakan ekonomi yang berbasis pada bukti. Memerlukan komitmen dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kerangka kerja digital. Termasuk infrastruktur dan regulasinya, dapat mendukung keberhasilan diplomasi ekonomi secara optimal.

Keberhasilan diplomasi ekonomi memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu mendorong sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat. Seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan bahwa strategi diplomasi ekonomi berjalan selaras. Partisipasi aktif sektor swasta dalam promosi produk lokal dan investasi juga menjadi kunci keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia. Pendekatan terkoordinasi, diplomasi ekonomi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Menciptakan hubungan ekonomi yang stabil, dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Diplomasi ekonomi memiliki tiga tujuan strategis yang telah dijelaskan secara spesifik. Pertama, menarik lebih banyak investasi asing untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional. Kedua, memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia di luar negeri. Untuk mendukung ekspor sebagai salah satu penggerak utama perekonomian. Ketiga, meningkatkan jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia, tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung tetapi juga memperkuat citra positif Indonesia di dunia internasional. Ketiga tujuan saling terintegrasi dan menjadi landasan bagi kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dihadapkan pada tantangan besar dalam menghadapi transformasi ekonomi digital yang berkembang pesat. Untuk menghadapi tantangan ini. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendorong ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu rekomendasi utama adalah meningkatkan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk daerah terpencil. Dengan memperluas akses internet berkecepatan tinggi dan memprioritaskan teknologi 5G. Pemerintah dapat mempersempit kesenjangan digital dan mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam ekonomi digital.

Pemerintah harus memperkuat kerangka regulasi yang mendukung inovasi teknologi, sambil tetap melindungi konsumen dan menjaga keamanan data. Memberikan insentif kepada startup teknologi dan perusahaan berbasis digital. Pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Mencakup pengembangan kebijakan perpajakan yang adil bagi ekonomi digital. Agar pelaku usaha lokal mampu bersaing dengan raksasa teknologi global. Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital melalui program pelatihan yang masif, guna memastikan tenaga kerja Indonesia siap menghadapi revolusi teknologi.

Pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan diplomasi digital sebagai bagian dari strategi hubungan internasional. Memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat memperkuat kolaborasi bilateral dan multilateral dalam bidang perdagangan, investasi, dan inovasi teknologi. Diplomasi digital dapat digunakan untuk membangun citra positif Indonesia di kancah global. Menarik investor asing, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Melalui pendekatan terintegrasi, pemerintah Prabowo-Gibran dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital. Memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan siber yang semakin krusial di era digital. Dalam mengembangkan ekonomi digital, perlindungan terhadap data pribadi dan sistem informasi harus menjadi prioritas utama. Pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan siber dan penguatan kebijakan perlindungan data pribadi. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dan pelaku bisnis untuk bertransaksi dalam dunia digital. Kerja sama dengan negara-negara lain dalam standar keamanan siber dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang siap beradaptasi dengan tantangan digital global.

Pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam inovasi ekonomi digital. Melalui kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi dan universitas, pemerintah dapat mempercepat pengembangan teknologi baru. Mendukung pertumbuhan ekonomi digital, seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things (IoT). Kolaborasi tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru, juga memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Membuka peluang ekspor produk teknologi Indonesia, serta mempercepat transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang lebih maju.

SIMPULAN

Strategi diplomasi ekonomi dan transformasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang muncul di era digital. Untuk memperkuat hubungan ekonomi internasional dan mempercepat pembangunan ekonomi domestik. Diplomasi digital, yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kebijakan luar negeri. Tidak hanya menjadi alat untuk komunikasi, tetapi sebagai instrumen strategis dapat memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara lain. Kerja sama berbasis pada e-commerce lintas negara dan penggunaan teknologi blockchain dalam perdagangan internasional. Menunjukkan bagaimana diplomasi digital dapat menciptakan peluang ekonomi baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, pemerintah harus memperkuat infrastruktur digital. Memastikan keamanan siber, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan ekonomi digital harus diperkuat. Menciptakan ekosistem yang mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, memperluas akses pasar internasional, dan meningkatkan daya saing global Indonesia di era digital. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk memperkuat posisinya di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.335>
- Adesina, O. S. (2017). Foreign policy in an era of digital diplomacy. *Cogent Social Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1297175>
- Alayida, N. F., Aisyah, T., Deliana, R., & Diva, K. (2023). Pengaruh Digitalisasi Di Era 4.0 Terhadap Para Tenaga Kerja Di Bidang Logistik. *Jurnal Economina*, 2(1), 1290–1304. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.286>
- Astuti, I. Y., Istiyani, N., & Yuliati, L. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 52. <https://doi.org/10.19184/jeam.v18i1.10646>
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Bjola, C., & Holmes, M. (2019). Digital Diplomacy. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Delanova, M. (2016). Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Negara-negara Berkembang dalam G-33 untuk Mempromosikan Proposal Special Products dan Special Safeguard Mechanism. *Jurnal Dinamika Global*, 1(01), 14–31. <https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.12>
- Dharossa, T., & Rezasyah, T. (2020). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(1), 105. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.26055>
- Fayard, D., Lee, L. S., Leitch, R. A., & Kettinger, W. J. (2012). Effect of internal cost management, information systems integration, and absorptive capacity on inter-organizational cost management in supply chains. *Accounting, Organizations and Society*, 37(3), 168–187. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.02.001>
- Filsafat, T., & Aquinas, T. (2024). *Konsep Esse dan Ens dalam konstruksi politik menjelang Pemilu 2024 : Sebuah analisis media sosial*. 10(2), 144–155. <https://doi.org/10.20473/jpi.v10i2.51092>

- Gautam, P. K. (2013). Relevance of Kautilya's Arthashastra. *Strategic Analysis*, 37(1), 21–28. <https://doi.org/10.1080/09700161.2012.737592>
- Ghina Fitri Ariesta Susilo, & Rani, U. (2020). Peran ekonomi digital terhadap hubungan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 16(2), 66–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jem.v16i2.4827>
- Gilboa, E. (2008). Searching for a theory of public diplomacy. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 55–77. <https://doi.org/10.1177/0002716207312142>
- Halim, R. S., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2023). Perkembangan Bisnis Di Era Digital. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(September), 3048–3074. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/580/666>
- Hamonangan, I., & Assegaff, Z. (2020). Cyber Diplomacy: Menuju Masyarakat Internasional yang Damai di Era Digital. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(4), 342. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i4.26246>
- Handaningtias, U. R., Praceka, P. A., & Indriyany, I. A. (2022). Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap Polisi: Studi Mengenai Wacana Public Dalam #Percumalaporporpolisi Dengan Pendekatan Big Data Analysis. *Ijd-Demos*, 4(3), 940–953. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.280>
- Haryono, E. (2018). Diplomasi Ekonomi sebagai Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia tahun 2015-2018 : Tantangan dan Peluang. *Global Strategies*, 13(2), 49–62.
- Killian, P. M. E. (2022). ASEAN's External Economic Relations and the Limits of Its Economic Diplomacy. *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(2), 314. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n2.4>
- Koesetianto, B. B., Nugroho, B. A., Syarifuddin, K. F., Susilawati, S., Supriyanto, T., Wiyono, W., Yusciantoro, P., & Midhio, I. W. (2024). Strategi Keamanan Nasional Republik Indonesia Menghadapi Rivalitas Amerika Serikat - China di Laut China Selatan. *Journal on Education*, 6(2), 12694–12711. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.5094>
- Lee, D., & Hocking, B. (2018). *Economic Diplomacy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.384>
- Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. *Business Horizons*, 52(4), 357–365. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.03.002>
- Nabilla, N. (2021). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Neraca Perdagangan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 227–239. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.15925>
- Nulty, P., Theocharis, Y., Popa, S. A., Parnet, O., & Benoit, K. (2016). Social media and political communication in the 2014 elections to the European Parliament. *Electoral Studies*, 44, 429–444. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.04.014>
- Olsen, K. B. (2023). *Geoeconomic Diplomacy: Reforming the Instrumentalization of Economic Interdependencies and Power* BT - *The Palgrave Handbook of Diplomatic Reform and Innovation* (P. W. Hare, J. L. Manfredi-Sánchez, & K. Weisbrode (eds.); pp. 649–671). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10971-3_32
- Olson, E. M., Olson, K. M., Czaplewski, A. J., & Key, T. M. (2021). Business strategy and the management of digital marketing. *Business Horizons*, 64(2), 285–293. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.12.004>
- Pambudi, A. A. (2021). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Global*, 6(01). <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i01.347>
- Paramasatya, S., & Poespojoedho, W. W. (2019). Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 245. <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14027>
- Parayil, G. (2005). The digital divide and increasing returns: Contradictions of informational capitalism. *Information Society*, 21(1), 41–51. <https://doi.org/10.1080/01972240590895900>
- Pigman, G. A. (2005). Making room at the negotiating table: The growth of diplomacy between nation-state governments and non-state economic entities. *International Journal of Phytoremediation*, 16(2), 385–401. <https://doi.org/10.1080/09592290590948414>
- Rashica, V. (2018). The Benefits and Risks of Digital Diplomacy. *SEEU Review*, 13(1), 75–89.

<https://doi.org/10.2478/seeur-2018-0008>

- Sabaruddin, S. S. (2017). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 69. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90>
- Sahputra, E. S. A., & Nendi, I. (2024). PENERAPAN BIG DATA DAN ANALYTICS UNTUK MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF. *CAKRAWALA*, 7(1), 37–48.
- Samiaji, A., Bahruddin, M., Harry, & Hidayat, E. (2022). Konstruksi Citra Negara dan Diplomasi Publik melalui @America di Kalangan Masyarakat Muslim Indonesia. *Medium*, 9(2), 276–290. [https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9\(2\).8836](https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(2).8836)
- Sholikin, A. (2018). *Kutukan Sumber Daya Alam (Resource curse)*. *Auty*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/d4shn/>
- Subbian, V., Solomonides, A., Clarkson, M., Rahimzadeh, V. N., Petersen, C., Schreiber, R., Demuro, P. R., Dua, P., Goodman, K. W., Kaplan, B., Koppel, R., Lehmann, C. U., Pan, E., & Senathirajah, Y. (2021). Ethics and informatics in the age of COVID-19: challenges and recommendations for public health organization and public policy. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 28(1), 184–189. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa188>
- Susanto, R. (2024). Pentingnya Keterampilan Berkomunikasi dalam Diplomasi dan Negosiasi. *AHKAM*, 3(1), 119–128. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2544>
- Trade, F., & Rights, G. L. (2006). Global Rules and Private Actors – Towards a New Role of the Introduction : Global Rules For or Through Private Economic Actors ? *New York*, 1–3.
- Ulfa, A., kunci Diplomasi Digital, K., Siber, D., Siber, P., & Siber, K. (2023). Analisis Komparatif Kekuatan Diplomasi Digital Indonesia-Australia Comparative Analysis of the Power of Digital Diplomacy in Indonesia-Australia Info Artikel Abstrak. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 355–370. <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>
- Wigell, M. (2016). Conceptualizing regional powers' geoeconomic strategies: neo-imperialism, neo-mercantilism, hegemony, and liberal institutionalism. *Asia Europe Journal*, 14(2), 135–151. <https://doi.org/10.1007/s10308-015-0442-x>
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 2(2), 70–95. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v2i2.9487>
- Yuniarti Utami, E., Manshur Al Ahmad, A. S., Pratama, R. A., Yuninata, D., & Prihandoko, L. A. (2023). Strategi Penetrasi Pasar Global: Eksplorasi Bibliometrik tentang Pemasaran Internasional, Mode Masuk Pasar, dan Strategi Ekspor. *Jurnal Bisnisan : Riset Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 25–38. <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v5i2.155>